



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI

KE PERUM BULOG DI PROVINSI JAWA BARAT

PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022

Tanggal 19 S.D 21 NOVEMBER 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2021**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI VI DPR RI**

KE PERUM BULOG DI PROVINSI JAWA BARAT PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Undang-Undang No. 13/2019 dan pasal 60 peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib mengatur bahwa komisi dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat melakukan kunjungan kerja dalam masa sidang.

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, diatur bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3.

B. Objek Kunjungan Kerja.

Objek kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI adalah PERUM Bulog di Cirebon. Tim melakukan dialog dan langsung melihat gudang Perum Bulog.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan Persaingan Usaha.

Secara khusus, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Perum Bulog dalam menyiasati kebutuhan bahan pangan pokok menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat di Cirebon ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan dengan pejabat BUMN dan

pejabat Perum Bulog dan langsung meninjau langsung gudang Bulog yang ada di Cirebon.

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-189	ARIA BIMA	PIMP. F. PDIP
2.	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, SKH, MM	F.PG
3.	A-135	HENDRIK LEWERISSA, SH, LLM	F.PGERINDRA
4.	A-361	ZURISTYO FIRMADATA, SE, MM	F.PNASDEM
5.	A-16	Drs. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si	F.PKB
6.	A-25	SITI MUKAROMAH, S.Ag, MAP	F.PKB
7.	A-544	DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	F.PD
8.	A-554	EDHIE BASKORO YUDHOYONO. M.Sc	F.PD
9.	A-536	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	F.PD
10.	A-409	RAFLI	F.PKS
11.	A-500	DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si	F.PAN

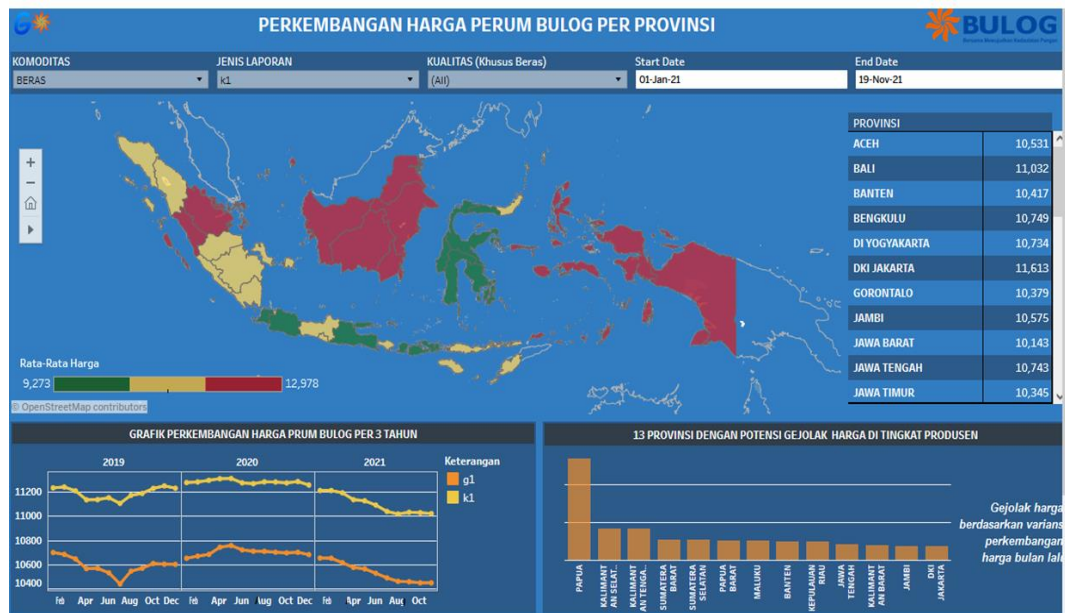
F. HASIL KUNJUNGAN

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota, pada bulan **Oktober 2021 terjadi inflasi sebesar 0,12 persen**. Khusus untuk komoditas beras, pada bulan Oktober 2021 memberikan sumbangan **deflasi sebesar 0,003 persen**. Beras diperkirakan memberikan sumbangan deflasi pada bulan November 2021 mengingat tren pada tahun sebelumnya dimana masih dalam keadaan mewabahnya COVID 19 komoditas beras memberikan sumbangan deflasi 0,009 persen.
2. Berdasarkan data BPS menunjukkan produk Gabah Kering Giling (GKG) selama semester II tahun 2021 berada dalam kondisi yang ideal sehingga tidak berpotensi mengganggu kestabilan harga dari hulu hingga hilir selama akhir tahun 2021.
3. Posisi harga hulu untuk gabah dan beras di periode akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 merupakan yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini ideal bagi pembentukan harga ke tingkat hilir namun bagi produsen dapat

memberatkan neraca usahanya. Kondisi penurunan tingkat profitabilitas usaha tani ini dapat mengurangi jumlah petani dan mengancam kesinambungan pasokan dalam jangka panjang.

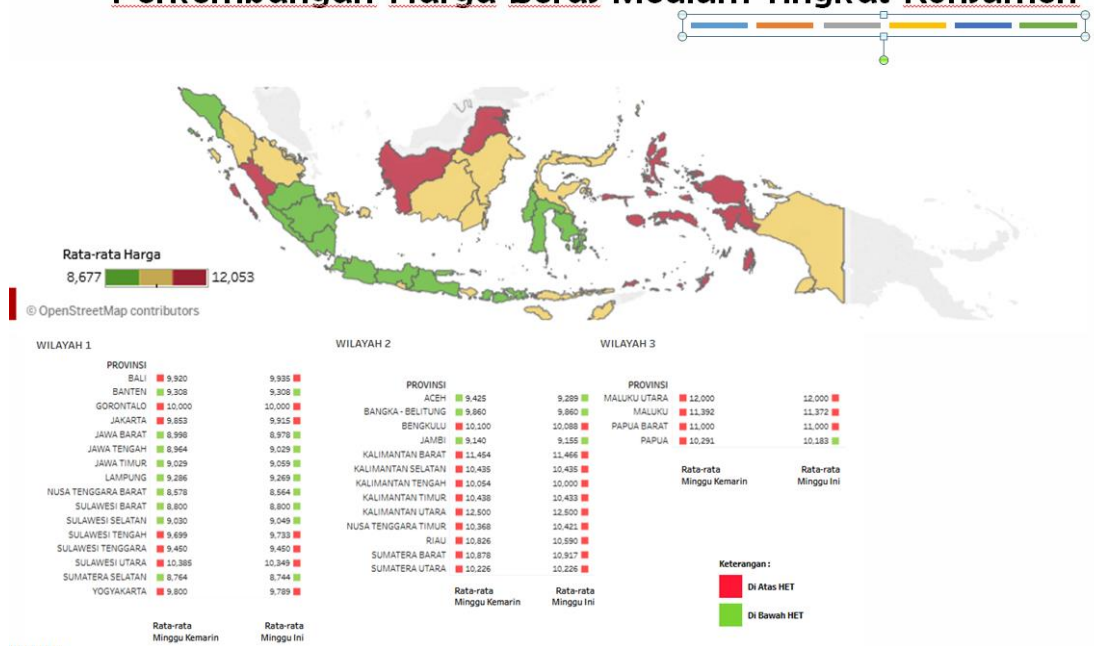
4. BMKG memprakirakan terdapat potensi anomali cuaca La Nina pada akhir tahun 2021. Kondisi tersebut ditambah prakiraan puncak musim hujan yang terjadi di bulan Januari-Februari 2022 maka sepanjang bulan November 2021 s/d Februari 2022 perlu diwaspadai peningkatan kejadian bencana alam dan/atau gagal panen akibat bencana hidrometrologi. Daerah yang perlu mendapat perhatian lebih antara lain Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali hingga NTT, Kalimantan bagian selatan dan Sulawesi bagian selatan.
5. Dalam konteks pengendalian inflasi, kondisi harga hilir di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 berada dalam kondisi yang relatif aman karena berpola cenderung mendatar. **Prakiraan data tidak menunjukkan adanya lonjakan harga berarti pada akhir tahun 2021**
6. Rendahnya tingkat harga pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 dapat memberikan tekanan harga kepada rantai pasok gabah dan beras terutama di sisi hulu. Jika kondisi ini dibiarkan maka dapat mengganggu kesinambungan usaha tani nasional. Indikator kondisi ini dapat dilihat pada tingginya angka harga gabah di bawah HPP.
7. Perkembangan harga Perum Bulog Per Provinsi.



Sumber : Dashboard SIGAP Perum BULOG

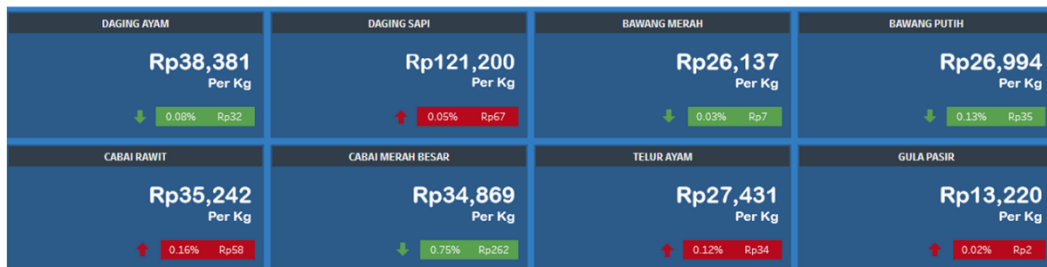
8. Perkembangan harga beras medium tingkat konsumen

Perkembangan Harga Beras Medium Tingkat Konsumen

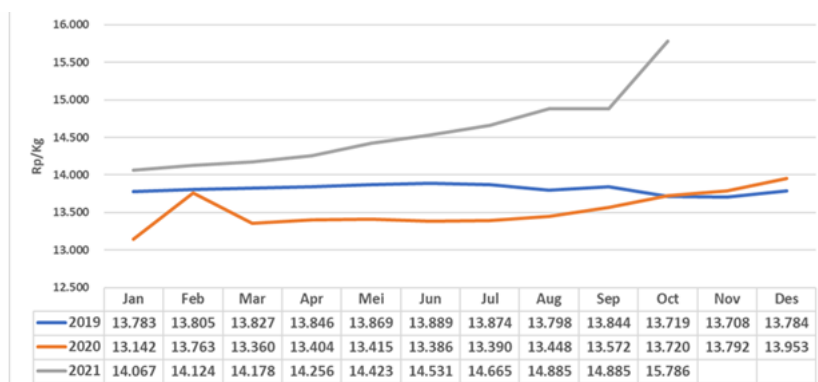


Sumber : Dashboard SIGAP Perum Bulog

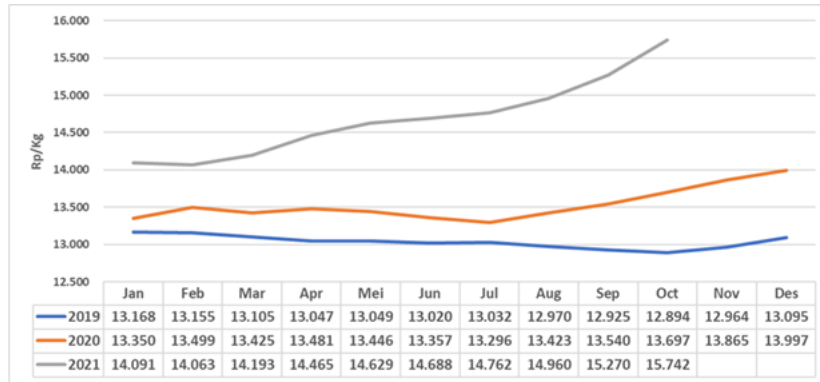
9. Perkembangan harga pangan (SIGAP)



10. Rata-rata harga minyak goreng eceran



Sumber : Data BPS



Sumber : Data Perum BULOG Per Oktober 2021

G. REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada Perum BULOG ada beberapa rekomendasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perum Bulog harus waspada dan konsisten untuk menjaga tugas dan fungsinya sebagai menjaga ketersediaan, pengendalian bahan pangan dan menjaga kestabilan harga bahan pangan pokok khususnya di Natal dan Tahun Baru.
2. Perum Bulog harus waspada dan konsisten di setiap proses kegiatan Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga harus menjaga protokol kesehatan mengingat ancaman penyebaran pandemi Covid-19 gelombang ketiga
3. Perum Bulog harus mewaspada potensi anomali cuaca La Nina pada akhir tahun 2021. Kondisi tersebut ditambah prakiraan puncak musim hujan yang terjadi di bulan Januari-Februari 2022 maka sepanjang bulan November 2021 s/d Februari 2022 perlu diwaspadai peningkatan kejadian bencana alam dan/atau gagal panen akibat bencana hidrometrologi.
4. Perum Bulog harus mewaspada dan melindungi petani dari ancaman tekanan harga dengan menjaga harga dasar gabah.
5. Perum Bulog harus diperkuat sebagai representasi negara untuk menjalankan fungsinya sebagai ketersediaan stok bahan pangan dan bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional.

**KETUA TIM KUNSPEK KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI JAWA BARAT**

TTD.

**ARIA BIMA
A-189**

H. DOKUMENTASI KEGIATAN



Foto : Tim Kunspek Komisi VI DPR RI



Foto : Ketua Tim Kuspek Komisi VI DPR RI Bapak Aria Bima



Foto : Dialog Anggota Komisi VI DPR RI dengan Perum BULOG